

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog dilihat dari lima dimensi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan juga akselerator. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, masih sering terjadinya miskomunikasi antara *stakeholders* yang terlibat seperti perbedaan pendapat dan juga informasi yang diberikan. Selain itu juga masih ditemukannya keterbatasan kelompok tertentu seperti komunitas dan juga pelaku usaha dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BUMDes maupun Pemdes, dan juga masih ditemukannya program yang tidak tersampaikan pada kelompok sasaran.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Berjo dilihat dari lima dimensi diantaranya : 1) *Policy Creator*, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Implementer, 5) Akselerator. Peran *stakeholders* sebagai *policy creator* belum optimal karena hasil kebijakan masih kurang jelas dan kurangnya transparansi terhadap *stakeholders* eksternal. Namun, peran *policy creator* BUMDes Alam Berjo sebagai pengelola utama wisata telah melakukan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan forum musdes. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan

bersifat partisipatif dengan berbasis kesepakatan bersama. Kebijakan yang direncanakan berlandaskan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Alam Berjo.

Peran *stakeholders* sebagai koordinator belum optimal hal ini karena pola koordinasi yang masih satu arah dan juga masih adanya aktor lapangan, yaitu Komunitas BENTUR yang tidak terlibat dalam koordinasi secara intensif. Selain itu juga, komunikasi yang ada antara lembaga masih kurang dengan adanya miskomunikasi antara *stakeholders* yang terkait. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan informasi yang disampaikan. Peran *stakeholders* sebagai fasilitator telah berjalan dengan BUMDes Alam Berjo, Pemdes Berjo, dan Disparpora Kab. Karanganyar menyediakan pelatihan dan pendampingan, serta forum MusDes. Namun, peran fasilitator menunjukkan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari BUMDes Alam Berjo yang hanya menyediakan pendampingan bagi komunitas dan juga pelaku usaha, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hanya menyediakan pelatihan satu kali dalam satu tahun dengan kelompok sasaran hanya pengelola utama atau hanya BUMDes.

Peran *stakeholder* sebagai implementor telah berjalan dengan BUMDes dan Komunitas BENTUR, serta pelaku usaha melaksanakan kebijakan wisata yang telah ditetapkan. Namun, peran ini belum optimal karena Komunitas BENTUR yang masih terbatas koordinasi sehingga masih kurang berpartisipasi secara struktural. Peran *stakeholder* sebagai peran akselerator telah berjalan dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karanganyar. Selain itu, peran akselerator belum optimal karena Disparpora Kab. Karanganyar hanya memberikan percepatan dengan dorongan promosi dan juga pemberian pelatihan terhadap pengelola utama, yaitu BUMDes Alam Berjo dalam waktu berkala dan tertentu saja. Secara keseluruhan, peran setiap *stakeholders* dalam pengembangan wisata Jumog dilakukan secara berkolaborasi satu dengan lainnya.

Peran *stakeholders* dalam keberjalanannya untuk Pengembangan Wisata Alam Jumog terdapat aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendorong diantaranya partisipasi masyarakat yang tinggi, dukungan dari pemerintah desa. Sedangkan, aspek penghambat peran *stakeholders* untuk Pengembangan Wisata Alam Jumog, yaitu komunikasi antar *stakeholders* yang belum optimal, dan juga pelatihan bagi Komunitas BENTUR yang terbatas dan juga dukungan dari pemerintah daerah yang masih terbatas.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo, maka disusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parwisata desa ke depannya;

- 1) Agar peran *stakeholders* dalam *policy creator* dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa Pemerintah Desa Berjo bersama BUMDes Alam Berjo disarankan untuk memperkuat substansi kebijakan pengelolaan wisata dengan

penyusunan aturan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh aktor lapangan lainnya serta memiliki legalitas formal, seperti adanya pembuatan kebijakan atau keputusan yang mengatur destinasi wisata yang ditetapkan secara resmi, misalnya pembuatan Peraturan Desa atau keputusan resmi dengan disertai nomor penetapan, sehingga dapat menjadi pedoman yang sah bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pengelolaan wisata.

- 2) Agar peran *stakeholders* dalam koordinator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa BUMDes Alam Berjo sebagai koordinator disarankan untuk mengembangkan pola koordinasi yang tidak hanya bersifat vertikal dan berjenjang, tetapi juga mendorong komunikasi horizontal antara *stakeholders*. Komunikasi horizontal di sini dimaksudkan bahwa koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog termasuk Pemdes, BUMDes, Disparpora, komunitas BENTUR, serta pelaku usaha. Selain itu, peningkatan forum koordinasi lintas aktor, baik formal maupun informal, perlu dilakukan agar informasi kebutuhan lapangan, serta permasalahan yang muncul dapat segera direspon secara bersama tanpa mengurangi perbedaan persepsi di antar lembaga. Hal ini juga akan meminimalisir adanya miskomunikasi antar lembaga. Selain itu, perlunya Komunitas untuk lebih banyak dilibatkan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan karena Komunitas BENTUR salah satu aktor penting dalam pengembangan wisata misalnya, dalam

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan aktivitas wisata yang mana suara komunitas BENTUR sebagai pelaksana kegiatan akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

- 3) Agar peran *stakeholders* dalam fasilitator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa para aktor fasilitator seperti BUMDes Alam Berjo, Pemerintah Desa Berjo, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan peran fasilitator dengan konsistensi dalam pemberian program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang lebih terstruktur dan juga lebih merata terhadap para pelaku wisata, dan juga berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pelaku wisata misalnya, pelatihan promosi digital bagi pengelola wisata, pelatihan peningkatan sumber daya manusia agar dapat lebih berinovasi dalam pengembangan wisata Jumog, dan juga pelatihan bagi komunitas sebagai pelaksana wisata agar berinovasi untuk kegiatan dan atraksi wisata. Pengelola wisata dapat melakukan kerja sama dengan akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menyesuaikan pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, BUMDes sebagai pengelola utama seharusnya memperkuat kelembagaan dengan memberikan pelatihan internal dengan pemberian pemahaman tupoksi dan juga memperbaiki sistem yang ada sebagai tempat sumber informasi dan juga sebagai bentuk transparansi.

- 4) Agar peran *stakeholders* dalam Implementor dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa BUMDes Alam Berjo, pelaku usaha, dan Komunitas BENTUR sebagai Implementor diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan pengelolaan wisata melalui penguatan pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan serta memperkuat komunikasi. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan, adanya komunikasi rutin mengenai kebutuhan yang diperlukan agar tidak terjadinya miskomunikasi, melaksanakan aktivitas wisata sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan juga mengesampingkan permasalahan pribadi yang menyebabkan perpecahan komunikasi.
- 5) Agar peran *stakeholders* dalam akselerator dapat berjalan lebih optimal maka penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai akselerator disarankan untuk memperluas bentuk percepatan dengan dorongan tidak hanya pada promosi wisata dan pelatihan SDM. Percepatan dorongan tambahan yang diberikan oleh Disparpora Kabupaten Karanganyar dapat berupa dorongan pemberian target pengunjung bagi desa wisata agar desa tersebut dapat meningkatkan promosi dan juga inovasi untuk menarik pengunjung. Selain itu juga, Disparpora Kabupaten Karanganyar dapat mempercepat perkembangan Wisata Alam Jumog dengan mendorong perkembangan fasilitas pendukung yang berada di Wisata Alam Jumog seperti, akses jalan menuju wisata yang harus nyaman bagi pengunjung.